

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk 5 tahun maupun perencanaan tahunan yakni RKPD dan RENJA SKPD.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2007 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020 ini kembali menyusun Rencana Kerja. Renja OPD Tahun 2020 ini merupakan rencana pembangunan OPD tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan perannya, misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31);
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 -2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;
- Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2019 – 2023, serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Menetapkan tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pembangunan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai selama tahun 2020.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sebagai pedoman OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020. Sebagai tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu dilakukan review dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal OPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral. Tercapai tidaknya sasaran-sasaran strategis dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai selama tahun 2018. Pengukuran Kinerja Sasaran strategis SKPD melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Adapun evaluasi capaian kinerja Renja tahun lalu (2018) dan capaian kinerja Renja tahun berjalan (2019) sampai pada realisasi triwulan III serta perbandingannya dengan target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut :

TABEL II.1
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU 2018 DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN BERJALAN 2019
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kagiatan s/d 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Tahun Berjalan		SKPD Penanggungjawab
							Target RKPD Tahun 2018	Realisasi RKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2019	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	03	17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENGALISTRIKAN		Jumlah dokumen pengembangan ketenagalistrikan	100%				1	1	%	
			02	Penyusunan Database Ketenagalistrikan Kabupaten Sinjai	Dokumen dasar ketenagalistrikan Kabupaten Sinjai	1	1	0	0	0	0	100	ESDM
			08	Verifikasi Calon Penerima Reaktor Biogas	Terverifikasinya calon penerima bantuan calon penerima reaktor biogas	1	0	1	1	100	1	200	ESDM
			09	Pengelolaan Data Alokasi Penerima Reaktor Biogas Berbasis SIG	Tersedianya data alokasi penerima reaktor biogas berbasis SIG	8	0	8	8	100	1	113	ESDM
			10	Pengembangan SDM Pengelola PLTMH Swadaya	Terfasilitasinya pengembangan ESDM pengelolah PLTMH dan PLTS	10	0	10	10	100	0	100	ESDM
2	03	18	PROGRAM PEMBANGUNAN ENERGI PERDESAAN		Tingkat presentase pembangunan energi perdesaan	100%				1	1	%	

			09	Peningkatan Kapasitas PLTMH Swadaya	Adanya peningkatan efektifitas PLTMH swadaya	1	0	0	0	0	0	0	0	ESDM
2	03	19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN		Pembinaan dan pengawasan air tanah dan air permukaan	100%		0	0	%	1	1	%	
			01	Koordinasi dan Pemantauan Pemanfaatan Biogas	Tersedianya data pengguna biogas	1	1	0	0	0	0	1	100%	ESDM
			02	Pemetaan Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Jumlah pemetaan potensi pemanfaatan panas bumi	1	0	1	1	100	0	1	100%	ESDM
			03	Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Panas Bumi	Jumlah Sosialisasi peraturan tentang pemanfaatan pans bumi	1	0	1	1	100	0	1	100%	ESDM
2	03	26	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG ESDM		Pembinaan dan pengawasan air tanah dan air permukaan	100%		0	0	%	1	1	%	
			01	Sosialisasi dan Verifikasi Calon Penerima Biogas	Jumlah masyarakat calon penerima biogas	75	75	0	0	0	0	75	100%	ESDM
			02	Edukasi Pengelolaan Pemanfaatan PLTS dan PLTMH	Jumlah pemantauan PLTS dan PLTMH	6	6	0	0	0	0	6	100%	ESDM
2	03	15	PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI		Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pemanfaatan EBT Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	100%		0	0	%	1	1	%	
			05	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	Jumlah PJUTS Terbangun	0	0	0	0	0	1	1	0	ESDM
			13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan EBT dan Panas Bumi	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan EBT dan Panas Bumi	0	0	0	0	0	108	108	0	ESDM
			14	Peningkatan Efektifitas PLTMH Swadaya	Optimalisasi Fungsi PLTMH Swadaya Masyarakat	0	0	0	0	0	1	1	0	ESDM

			16	Penyusunan Detill Engineering Design (DED) Biomassa	Dokumen Perencanaan Pembangunan Biomassa	0	0	0	0	0	1	1	0	ESDM
2	06	15		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Makan dan Minum Tradisional/Jajanan Sekolah dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	
					Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP.	24	2	4	4	100%	8	14	58%	
			02	Pengawasan dan Alat UTTP dan BDKT (Metrologi Legal)	Jumlah alat UTTP yang memenuhi Standar	0	0	0	0	0%	2224	2224	0%	Perlindungan Konsumen
			03	Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang	Jumlah pengamanan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan	40	25	48	48	100%	48	121	303%	Perlindungan Konsumen
			04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrolgian Daerah	Jumlah alat UTTP yang di tera ulang	1	3	8000	330	4%	0	333	33300%	Perlindungan Konsumen
			05	Evaluasi Pengguna Alat UTTP (metrologi legal) dan Pengawasan BDKT	Jumlah pengawasan/evaluasi UTTP	150	98	18	16	89%	0	114	76%	Perlindungan Konsumen
			08	Pembinaan Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Tradisional/Jajanan Sekolah	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha makan dan minuman tradisional atau jajanan sekolah	71	42	4	4	100%	27	73	103%	Perlindungan Konsumen
			09	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga dan Konsumen	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha makan dan minuman tradisional/jajanan sekolah	14	6	9	9	100%	0	15	107%	Perlindungan Konsumen
			04	Pelatihan Reparatur Alat UTTP Bidang Kementrologian	Meningkatnya Tenaga Reparatur dibidang Kementrologian	0	0	0	0	0%	10	10	0%	Perlindungan Konsumen

2	06	18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Jumlah Regulasi daerah Baru tentang Perdagangan	4	1	1	1	100%	1	3	75%	
					Jumlah Usaha Baru yang terbentuk dan berelagilitas	2480	779	500	568	114%	550	1897	76%	
					Jumlah sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	13	2	2	2	100%	4	8	62%	
			01	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan Pelaksanaan Operasional	Jumlah regulasi daerah yang disusun	4	3	1	0	0%	0	3	75%	Perdagangan
			02	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Jumlah usaha yang awasi dan ditertibkan serta disurvey kelayakan	2480	1929	600	259	43%	0	2188	88%	Perdagangan
			06	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi	Jumlah Sistem/ jaringan Informasi perdagangan yang diadakan	3	4	1	1	100%	0	5	167%	Perdagangan
			07	Sosialisasi Peningkatan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi dan emasaran langsung produk IK/IRT potensi Kabupaten Sinjai	24	21	5	5	100%	5	31	129%	Perdagangan
			08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pendataan dan penyusunan database perdagangan	13	8	5	2	40%	3	13	100%	Perdagangan
			09	Pemutakhiran Data Base Sarana Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pendataan dan penyusunan database perdagangan	4	2	0	0	0%	0	2	50%	Perdagangan
			10	Fasiltasi Informasi dan Tata Niaga Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Monitoring Harga Barang Pokok dan Penting Lainnya	148	96	48	48	100%	0	144	97%	Perdagangan
			12	Pembebasan Lahan	Jumlah lahan pasar yang dibebaskan dan disertifikatkan	4	0	1	0	0%	0	0	0%	Perdagangan
			13	Optimalisasi Operasional UPTD Pasar	Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Sinjai	2	1	1	1	100%	12	14	700%	Perdagangan
			14	Festival Wisata Kuliner	Terlaksananya promosi dan pemasaran langsung produk	50	0	50	50	100%	0	50	100%	Perdagangan

					IK/IRT potensial Kabupaten Sinjai									
			15	Bazar Sembako Murah	Terlaksananya bazar sembako murah 9 kali	9	0	0	0	0%	0	0	0%	Perdagangan
			01	Pengawasan Usaha Perdagangan	Jumlah Usaha yang diawasi	0	0	0	0	0%	300	300	0%	Perdagangan
			04	Pasar PKL dan Kuliner Terintegrasi dan Penataan Pedagang Kuliner Jalan Raya Tondong	Terlaksananya Pasar PKL dan Kuliner Khas Kabupaten Sinjai Terintegrasi	0	0	0	0	0%	17	17	0%	Perdagangan
			09	Pemantauan dan Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	0	0	0	0	0%	12	12	0%	Perdagangan
			11	Penataan Pedagang Pasar Rakyat	Terlaksananya Penataan Pasar Rakyat	0	0	0	0	0%	10	10	0%	Perdagangan
			12	Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	0	0	0	0	0%	26	26	0%	Perdagangan
2	06	19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN		Peningkatan jumlah binaan kelompok pedagang kaki lima	2	100	0	0	0%		0	0%	Disperindag
			01	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi PKL	62	22	1	1	100%	0	23	37%	Perdagangan
2	07	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Operasional SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Air Bersih dan Listrik	60	48	12	12	100%	12	72	120%	Sekretariat
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pelayanan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	125	103	38	38	100%	38	179	143%	Sekretariat
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Pelayanan kebersihan Kantor	60	48	12	12	100%	12	72	120%	Sekretariat
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Alat Listrik dan Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	65	57	12	12	100%	12	81	125%	Sekretariat

			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	60	36	12	12	100%	12	60	100%	Sekretariat
			19	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	60	48	12	12	100%	12	72	120%	Sekretariat
			20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pelayanan Administrasi Keuangan	60	48	12	12	100%	12	72	120%	Sekretariat
			22	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Konsultasi dalam dan Luar Daerah	240	230	65	129	198%	150	509	212%	Sekretariat
			23	Penataan Administrasi Kepegawaian	Tertatanya Administrasi Kepegawaian	60	48	12	12	100%	12	72	120%	Sekretariat
2	07	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik dan Layak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yg diadakan	6	12	2	2	100%	2	16	267%	Sekretariat
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg diadakan	23	21	5	4	80%	7	32	139%	Sekretariat
			10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yg diadakan	46	64	15	49	327%	0	113	246%	Sekretariat
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	48	2	2	100%	1	51	85%	Sekretariat
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	60	48	12	9	75%	40	97	162%	Sekretariat
			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang baik dan layak	36	28	10	10	100%	14	52	144%	Sekretariat
			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang baik dan layak	93	48	18	12	67%	36	96	103%	Sekretariat
2	07	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Terwujudnya Peningkatan Kedisiplinan Para Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	

			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	190	135	0	0	0%	0	135	71%	Sekretariat
2	07	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Terdidik dan Terlatih	80%	10%	50%	50%	100%	50%	37%	46%	
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat struktural atau fungsional	45	20	0	0	0%	0	20	44%	Sekretariat
			03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	45	45	8	8	100%	20	73	162%	Sekretariat
2	07	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	14	10	3	3	100%	3	16	114%	Sekretariat
			02	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	38	20	6	4	67%	12	36	95%	Sekretariat
2	07	16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		Jumlah IKM/IRT Agro dan Hutan yang pemula, berkembang dan Mandiri	188	164	64	64	100%	70	70	37%	
					Jumlah IKM/IRT ILMETA yang pemula, berkembang dan Mandiri	85	23	24	24	100%	31	31	36%	
					Jumlah Produk IKM yang dapat berdaya saing dipasaran	50	20	10	10	100%	10	30	60%	
			01	Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IK olahan makanan dan minuman yg didampingi/difasilitasi bimtek pengolahan dan perbaikan kualitas produk IKM	160	125	30	45	150%	50	220	138%	Perindustrian
			10	Fasilitasi desain kemasan produk IK/IRT	Jumlah IKM/IRT olahan makanan dan minuman yang difasilitasi desain label dan	5	4	20	30	150%	0	34	680%	Perindustrian

					kemasan									
			08	Pengembangan IKM berbasis hasil laut, perikanan dan peternakan	Jumlah IKM/IRT hasil Perikanan yang difasilitasi bimtek peningkatan mutu produk	40	24	10	20	200%	0	44	110%	Perindustrian
			12	Pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan	Jumlah IKM/IRT Pengolahan hasil hutan yang didampingi, dilatih proses dan diversifikasi produk	25	11	5	10	200%	10	31	124%	Perindustrian
			13	Fasilitasi bagi pengembangan IKM hasil logam dan alsintan	Jumlah IKM yang difasilitasi pendampingan, OJT, dan Pelatihan Teknis Pembuatan Cangkul	98	19	22	44	200%	3	66	67%	Perindustrian
			14	Fasilitasi dan Pengembangan industri kimia dan aneka	Jumlah IKM Kimia dan Aneka yang difasilitasi pendampingan, melanjutkan pendataan dan diagnosis IKM Industri Kimia dan Aneka (Industri Fashion)	30	24	10	23	230%	5	52	173%	Perindustrian
			15	Fasilitasi Penumbuhan dan pengembangan usaha industri	Jumlah IKM Mesin dan Elektronika yg dibina	30	2	0	0	0%	0	2	7%	Perindustrian
			16	Fasilitasi dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik	terlaksananya pendampingan otomatisasi mesin, fasilitasi sertifikasi promosi dan pelatihan pembuatan prototype mesin	75	30	1	2	200%	2	1	1%	Perindustrian
			17	Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Ikan	jumlah IK/IRT yang dikembangkan	30	2	0	0	0%	0	2	7%	Perindustrian
			18	Pengadaan Sarana dan Prasarana IKM	jumlah IKM/IRT olahan makanan dan Minuman yang difasilitasi Desain label kemasan	1	0	1	0	0%	0	0	0%	Perindustrian
			17	Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren	Terlaksananya Bangunan Rumah Produksi Rumah Gula Aren	1	0	1	1	0%	0	1	100%	Perindustrian
			03	Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM Hasil Perikanan yang difasilitasi	0	0	0	0	0%	10	10	0%	Perindustrian

				Pengolahan Hasil Perikanan										
			09	Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan	Terwujudnya Produk IKM yang tersertifikasi Halal dan HAKI	0	0	0	0	0%	1	1	0%	Perindustrian
			10	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Kerajinan	Jumlah IKM Kerajinan yang dibina pendampingan dan OJT Industri Kerajinan	0	0	0	0	0%	5	5	0%	Perindustrian
2	07	17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI			47	12	17	17	100%	8	37	79%	
			02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IK/IRT Kerajinan yang dilatih diversifikasi kerajinan batu permata dan batu pakis	47	32	10	10	100%	0	42	89%	Perindustrian
2	07	19	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA -SENTRA INDUSTRI POTENSIAL			5	1	2	2	100%	2	2	40%	
			04	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengolahan Tembakau	Jumlah Kelompok IKM Industri Pengolahan Tembakau yang dilatih dan dibina	12	7	3	6	200%	1	14	117%	Perindustrian
			03	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	1	1	1	100%	1	2	100%	Perindustrian
2	07	18	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI			1	0	0	0	0%	0	0	100%	
			01	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah	Pengembangan Industri yg disusun	1	1	0	0	100%	0	1	100%	Perindustrian

Berdasarkan Tabel II.1 di atas dapat dilihat bahwa Program dan kegiatan pada Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai terdiri dari 18 (delapan belas) Program dan 78 (tujuh puluh delapan) Kegiatan. Untuk tahun 2019 akan dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program dengan 46 (empat puluh enam) Kegiatan.

Adapun hasil telah terhadap Evaluasi Perencanaan Daerah sesuai dengan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 sampai dengan tahun berjalan (2019) adalah sebagai berikut :

- Dari 18 (delapan belas) Program yang telah dilaksanakan mulai pada tahun kedua renstra (2017) sampai pada tahun terakhir renstra (2018) diharapkan capaian kinerjanya mencapai rata-rata 99%.
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 telah berjalan sesuai yang direncanakan dan diharapkan pada akhir tahun 2018 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- Untuk tahun berjalan Tahun 2019 ada 6 (enam) dengan 46 (empat puluh enam) kegiatan yang merupakan awal Renstra 2019 - 2023

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya inovasi produk dari pelaku IKM;
- b. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
- c. Kesadaran SDM IKM dan Pelaku Usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah;
- d. Sarana dan prasarana perdagangan yang layak dan representatif belum tersebar secara merata;
- e. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- f. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- g. Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikro hidro dan bio energi belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan pengembangan struktur ekonomi kerakyatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan Program-program dan kegiatan yang pada dasarnya adalah guna meningkatkan pendapatan masyarakat utamanya yang berbasis pada ekonomi kerakyatan pada bidang Perdagangan, Industri dan Energi Sumber Daya Mineral. Capaian kinerja di Bidang Industri, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dapat diukur sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan baik itu SPM dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM.

Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai sampai pada tahun 2018 berdasarkan target perencanaan pada Perubahan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, dapat dilihat pada Tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2

PENCAPAIAN KENIRJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN S/D 2018
KABUPATEN SINJAI

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET IKK (2018)	TARGET RANSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANLISIS
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
A	IKK													
1	<i>Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB</i>	%	1,8	1,47	1,5	1,6	1,7	1,8	1,47	2.73	2.75	2.78	1,8	
2	<i>Persentase Pertumbuhan Industri</i>	%	25	22,87	23	24	24,5	25	22,87	23	24	25	25	
3	<i>Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB</i>	%	15	11,36	12	13	14	15	11,44	11.36	11.45	11.5	15	
4	<i>Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan</i>	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	INDIKATOR KINERJA UTAMA													
1	<i>Peningkatan Nilai Produksi dari Sektor Industri Daerah</i>	Rp (M)	317,8	181,68	208,93	240,27	276,31	317,8	181,68	208,93	240,27	276,31	468,29	
2	<i>Persentase IKM yang dapat berkembang dan berdaya saing</i>	%	60	40	45	50	55	60	31	45	50	55	60	
3	<i>Rasio Produk IKM yang dapat berdaya saing di pasaran.</i>	%	30	15	20	25	28	30	30	30	35	40	13	

4	<i>Cakupan Bina Kelompok Pengrajin</i>	%	55	27	30	40	45	55	25	30	40	45	55	
5	<i>Jumlah Sentra-sentra/IKM baru yang potensial</i>	Sentra	5	2	2	3	5	5	2	2	3	5	5	
6	<i>Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Daerah</i>	Dok	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	
7	<i>Peningkatan Jumlah Komoditi daerah yang diekspor</i>	Jenis	10	-	-	4	7	10	-	-	4	7	-	
8	<i>Peningkatan volume produksi komoditi ekspor daerah</i>	Ton	10000	-	-	5,000	7,000	10000	-	-	5,000	7,000	-	
9	<i>Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan di daerah</i>	Rp (M)	1085,6	741,5	815,65	897,22	986,94	1085,6	741,5	815,65	897,22	986,94	1,093	
10	<i>Rasio Usaha yang memiliki izin</i>	%	65	45,91	50	55	60	65	45,91	50	55	55	312	
11	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang di bangun/direvitalisasi</i>	%	50	25	30	35	45	50	23,53	27,45	35	35	80	
12	<i>Cakupan Bina Kelompok pedagang/Usaha Informal</i>	%	0.6	0,4	0,45	0,5	0,55	0.6	0,4	0,45	0,5	0,5	0,6	
13	<i>Cakupan Wilayah Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</i>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

14	<i>Persentase Pengaduan/Sengketa Konsumen yang diselesaikan</i>	%	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	
----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	--

Berdasarkan Tabel II.2 di atas dapat dilihat bahwa dari beberapa indikator-indikator yang telah ditetapkan baik itu IKK (Indikator Kinerja Kunci) dan IKU (Indikator Kinerja Utama) di bidang industri, perdagangan ESDM serta Indikator Kinerja Mandiri (IKM) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Dari 4 (Empat) IKK yang telah ditetapkan terdapat satu indikator kinerja yang belum terealisasi yakni Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Daerah, hal tersebut terjadi karena kami kesulitan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan nilai ekspor dan impor daerah. Sedangkan untuk indikator IKK lainnya seperti kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB (bdhb) daerah yang ditargetkan mencapai 1,8% pada tahun 2018 sudah mencapai 1,8% pada akhir periode di tahun 2018, dan tingkat pertumbuhan industri yang ditargetkan mencapai 25% pada tahun 2018 telah mencapai 25% pada tahun 2018, sedangkan Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB (bdhb) daerah yang ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2018 telah mencapai 15% pada akhir tahun 2018.
- Untuk IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD di bidang industri dan perdagangan terdapat 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan yakni Indikator Peningkatan Nilai Produksi Industri Daerah, yang ditargetkan sebesar Rp. 317, 76 Milyar pada Tahun 2018 telah mencapai Rp. 468,29 Milyar Pada Tahun 2018, dan indikator Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan dalam daerah, yang ditargetkan sebesar Rp. 1085,3 Milyar pada tahun 2018 telah mencapai Rp. 1093 Milyar pada Tahun 2018.
- Sedangkan untuk 11 (Sebelas) IKM (Indikator Kinerja Mandiri) lainnya capaiannya kinerjanya cukup bagus ini terlihat dari capaian kinerja sampai pada tahun 2018 yang rata-rata telah mencapai 95% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

2.2.1. Pelayanan Sektor Industri

Di bidang Pengembangan Industri, dalam rangka menentukan arah, sasaran dan kebijakan Pengembangan Industri Nasional ke depan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang di dalamnya diatur mengenai pemberian fasilitas berupa Insentif Fiskal, Insentif Non-Fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengusaha industri tertentu, seperti industri prioritas tinggi, industri pionir, industri yang dibangun di daerah terpencil dan sebagainya. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden tersebut di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menyusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2015, yang kemudian telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 113/M-IND/PER/12/2011 pada Tanggal 29 Desember Tahun 2011.

Selama lima tahun terakhir, telah dilaksanakan berbagai langkah pengembangan industri kecil dan menengah. Pada bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan,

Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan beberapa langkah penting, seperti:

- 1) Bantuan Mesin/Peralatan atau perlengkapan produksi bagi IKM binaan yang potensial yang tersebar di Sembilan kecamatan.
- 2) Pelatihan atau Bimbingan Teknis dan Pendampingan langsung untuk IKM/IRT potensial dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas produksi.
- 3) Fasilitasi pengujian produk dan sertifikasi produk baik sertifikat P-IRT, halal, SNI dll serta fasilitasi desain kemasan sampai pada pemasaran produk IKM/IRT binaan yang ada.
- 4) Pengembangan dan inisiasi sentra industri baru yang potensial diantaranya sentra pande besi di sinjai barat dan Sinjai Utara, sentra industri pengolahan tembakau menjadi produk rokok di Sinjai Borong dan Sinjai Barat.
- 5) Fasilitasi bagi IKM unggulan mendapatkan penghargaan GKM (Gugus Kendali Mutu) baik ditingkat Propinsi maupun tingkat Nasional.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri hasil perikanan yang bealokasi di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara.

TABEL II.3
DATA PERKEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2014 S/D 2018

NO	VARIABEL	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Unit Usaha	3,307	3,375	3,517	3,720	3,777
2	Jumlah Tenaga Kerja	9,425	9,699	10,122	10,791	10,971
3	Nilai Investasi	52,232,608	57,068,843	63,248,255	92,652,735	97,713,735
4	Nilai Produksi	148,655,499	181,678,939	217,594,079	453,236,389	468,293,043
5	Nilai Bahan Baku	78,161,941	94,826,153	112,093,348	223,072,877	230,997,223

* : Data Bidang Industri
 * : Sinjai Dalam Angka 2018

2.2.2. Pelayanan Sektor Perdagangan

Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan dalam negeri utamanya di Kabupaten Sinjai, terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Sinjai di Kategori Perdagangan Besar, eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor (Metode Baru BPS). Nilai tambah Kategori Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor selama periode 2013- 2017 menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun, yaitu Rp 509,90 milyar pada tahun 2013, menjadi Rp 848,33 milyar pada tahun 2017. Peranan sektor ini dalam PDRB kabupaten masih tetap tinggi, yaitu 11 s/d 12 persen dari PDRB kabupaten.

Pada tahun 2014 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 dimana diatur tentang kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian yang diarahkan pada :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d. Peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri; dan
- e. Perlindungan konsumen.

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri yang dimaksud paling sedikit mengatur :

- a. Pengharmonisasian peraturan, Standar, dan Prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah/atau antar daerah;
- b. Penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang;
- c. Pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat;
- d. Pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan;
- f. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- g. Perdagangan antar pulau; dan
- h. Perlindungan konsumen.

Pengendalian perdagangan dalam negeri yaitu meliputi :

- a. Perizinan,
- b. Standar; dan
- c. Pelarangan dan pembatasan.

Upaya Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat termasuk bagi usaha kecil dan menengah. Sementara itu, tenaga kerja di bidang perdagangan lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung, eceran tradisional, eceran modern, kecuali mobil dan motor. Dengan peningkatan sinergi dan koordinasi, maka 70 persen tenaga kerja sektor perdagangan yang terisi oleh usaha informal dapat ditingkatkan statusnya. Selain itu, integrasi strategis dengan segmen komunitas ekonomi kreatif diyakini akan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

2.2.3. Pelayanan Sektor Energi Sumber Daya Mineral

Peranan sektor ESDM sebagai pendorong pembangunan di Kab. Sinjai diwujudkan antara lain dalam bentuk pembangunan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan listrik pedesaan serta pengelolaan dan pengembangan potensi energi dan mineral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan program energi baru terbarukan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar listrik serta untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kemasyarakatan di Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan sejak tahun 2013 hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel II.4

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Tersebar

No.	Kegiatan	Tahun	Lokasi	Anggaran (Rp)	Daya	Penerima Manfaat
1	Pembangunan PLTS Tersebar	2013	Pulau Katindoang Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan	176.539.000	@ 50 Wp	25 Rumah Tangga
2	Pembangunan PLTS Terpusat (DAK TA.2014)	2013	Pulau Kodingare dan Pulau Batanglampe Desa Pulau Padaelo Kec.Pulau Sembilan	2.725.507.000	Kodingare 5KWp, B.Lampe 5 Kwp	241 Rumah Tangga
3	Pembangunan PLTS Terpusat (DAK TA.2014)	2014	Pulau Kanalo I Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan	2.496.483.000	15 KWp	120 Rumah Tangga
4	Pembangunan PLTS Terpusat (DAK TA.2015).	2015	Pulau Liang-Liang Desa pulau Harapan Kec.Pulau Sembilan	3.232.983.000	20 KWp	142 Rumah Tangga
5	Pembangunan PLTS Terpusat	2016	Pulau Burunglohe Desa Pulau Buhung Pitue Kec. Pulau Sembilan	APBN	100 KWh	452 Rumah Tangga
6	Pembangunan PLTS Terpusat	2017	Pulau Kanalo II Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan	APBN Tk I	30 KWp	117Rumah Tangga 7 Fasilitas
Total				8.631.512.000		1.097 Rumah Tangga 7 Fasilitas Umum

Tabel. II.5

Pembangunan Reaktor Biogas Rumah Skala Kecil dan Menengah

No.	Kegiatan	Tahun	Lokasi	Anggaran (Rp)	Satuan	Penerima Manfaat
1	Pembangunan Reaktor BioGas Rumah	2013	Kec. Sinjai Tengah, Tellulimpoe dan Sinjai Selatan	139.191.000	@ 4 m ³	10 Rumah Tangga
			Kec. Sinjai Selatan	APBD Tk.I	@ 6 m ³	8 Rumah Tangga
2	Pembangunan Reaktor BioGas Rumah	2014	Kec. Sinjai Selatan, TelluLimpoe, Sinjai Timur dan Bulupoddo	461.000.000	@ 4 m ³	46 Rumah Tangga
			Kec. Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Selatan & Tellulimpoe	APBD Tk.I	@ 6 m ³	24 Rumah Tangga
3	Pembangunan Reaktor Biogas Rumah	2015	Kec. Sinjai Selatan, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Borong Sinjai Utara dan Tellulimpoe	553.681.000	@ 4 m ³	50 Rumah Tangga
			Kec. Sinjai Selatan, Sinjai Timur, Sinjai Tengah	153.600.000	@ 4 m ³	14 Rumah Tangga
			Kec. Tellulimpoe	APBD Tk.I	@ 6 m ³	30 Rumah Tangga
			Kec. Sinjai Barat, Sinjai Selatan, Sinjai Timur & Tellulimpoe	APBN	@ 6 m ³	120 Rumah Tangga
4	Pembangunan Reaktor BioGas Rumah	2016	Kec. Sinjai Barat, Sinjai Selatan, Sinjai Timur dan Tellulimpoe	APBD Tk.I	@ 6 m ³	130 Rumah Tangga
				1.307.472.000		432 Rumah Tangga

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.3.1. Permasalahan Bidang Perindustrian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perindustrian, sebagai berikut:

1. Kontribusi IKM (Industri Kecil dan Menengah) Terhadap PDRB Kabupaten masih kecil;
2. Belum tumbuh dan berkembangnya IKM yang melakukan ekspor;
3. Masih terbatas dan belum tersedianya bahan baku secara kontinyu, terutama pada hasil agro, sehingga akan mempengaruhi pada peningkatan produksi.
4. Masih rendahnya jiwa enterprenuer Pelaku IKM, keterampilan teknis, manajemen dan kemampuan pengembangan produk.
5. Masih rendahnya daya saing produk IKM disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pengembangan produk dan tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh bebrapa bahan baku penunjang diproduksi dari luar daerah atau bahkan merupakan produk impor.
6. Kurang tersedianya sarana pengujian produk IKM terutama dalam pendugaan masa simpan produk.
7. Masih terbatasnya SDM aparat Pembina yang menguasai prinsip-prinsip fungsional industry seperti SNI, GMP (Good manufacturing Practicius), HACCP 9 Hazard Analisis Critical Control Point).

2.3.2. Permasalahan Bidang Perdagangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perdagangan, sebagai berikut:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana pasar rakyat.
2. Status lahan pasar yang belum bersertifikat, sebagian besar pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah belum memiliki sertifikat sehingga menjadi bermasalah atau mengalami kendala ketika dilakukan pengusulan dalam rangka pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat.
3. Memasuki era pasar bebas yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Tahun 2015 nanti, menghendaki kesiapan pemerintah khususnya melalui bidang Perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan standar produksi dalam negeri, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
4. Masih terjadinya fluktuasi harga-harga barang kebutuhan masyarakat, utamanya bahan kebutuhan pokok, karena adanya hambatan kelancaran distribusi bahan pokok dan barang strategis di saat-saat tertentu,
5. Masih perlunya upaya peningkatan kepastian hukum dalam persaingan usaha perlindungan terhadap konsumen.
6. Pengelolaan Pasar Rakyat yang belum maksimal, kondisi ini disebabkan belum tersedianya regulasi yang memuat secara jelas tentang pengelolaan Pasar Rakyat. Mekanisme pengelolaan Pasar Rakyat yang tepat mengacu pada SNI 8152:2015 Tentang Pasar Rakyat.

7. Kelangkaan bahan pokok dan bahan strategis lainnya, kondisi ini terjadi akibat berkurangnya pasokan dari produsen maupun kondisi pola distribusi bahan pokok maupun bahan strategis lainnya dimana pedagang besar lebih memilih untuk membawa produknya di Daerah yang menawar dengan harga lebih tinggi.

2.3.3. Permasalahan Bidang ESDM

1. Terbatasnya pasokan listrik untuk industri dan rumah tangga
2. Potensi energi baru terbarukan seperti energi matahari dan mikro hidro serta bio energi belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk melihat hasil identikasi permasalahan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM serta factor-faktor yang dapat mendukung penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel II.6 sebagai berikut :

TABEL II.6
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PERDAGANGAN, INDUSTRI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019
KABUPATEN SINJAI

Permasalahan	Faktor - faktor Penentu Keberhasilan
Bidang Perindustrian 1. Kurang tersedianya Sarana Pengujian Produk IKM terutama dalam pendugaan masa simpan	Bidang Perindustrian 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industry
2. Terbatasnya SDM aparat Pembina dan Pelaku IKM/IRT yang menguasai Prinsip-Prinsip fungsional industry seperti SNI, GMP,HACCP dll	2. Memfasilitasi para Pelaku IKM dengan Pelatihan - pelatihan dalam meningkatkan daya saing produknya 3. Melakukan Peningkatan kualitas SDM para Pembina dengan pelatihan - pelatihan dan Study Banding
3. Rendahnya Daya Saing Produk IKM disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pengembangan Produk dan tingginya biaya produksi. 4. Rendahnya Jiwa Enterpreneur Pelaku IKM, keterampilan tehnis, manajemen dan kemampuan pengembangan produk 5. Masih sulitnya mencari pemasaran bagi produk-produk Indusri Kecil dan Menengah	4. Melakukan Pendampingan langsung terhadap IKM/IRT unggulan/potensial. 5. Fasilitasi dalam pengembangan daya saing produk 6. Fasilitasi Bantuan Modal dan Peralatan bagi IKM/IRT 7. Fasilitasi Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM IKM/IRT potensial 8. Fasilitasi Jaringan Pemasaran produk IKM/IRT 9. Fasilitasi Kemitraan IKM/IRT dengan Swasta 10. fasilitasi Desain Kemasan Bagi Produk-produk IKM/IRT
6. Belum adanya kebijakan pengembangan Industri yang berbasis pada Logam, Mesin dan Elektronika 7. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan industry daerah, terutama yang berbasis pada pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal.	11. Penyusunan Arah Kebijakan (Road Map) Pengembangan Industri Berbasis Logam, Mesin dan Elektronika. 12. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat melalui pameran-pameran untuk mempromosikan produk-produk IKM/IRT
Bidang Perdagangan 1. Masih Kurang memadainya Sarana dan Prasarana Pasar yang ada 2. Masih terjadinya fluktuasi harga-harga (Disparitas) Harga barang kebutuhan masyarakat, utamanya Sembako karena adanya hambatan kelancaran distribusi barang. 3. Belum adanya Data Base Potensi dan Komoditi Ekspor Daerah. 4. Masih Rendahnya Nilai Komoditi Ekspor daerah 5. Belum tertib dan tertatanya tempat-tempat Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	Bidang Perdagangan 1. Melakukan Pembangunan dan Penataan Pasar tradisional (Revitalisasi Pasar) 2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 3. Meningkatkan akses pasar dan jaringan Distribusi Barang dan Jasa 4. Pengawasan dan penertiban usaha dan kawasan perdagangan 5. Penyusunan Data Base Potensi dan Komoditi Ekspor daerah 6. Pengembangan Komoditi Ekspor Daerah. 7. Penyediaan Tempat bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 8. Pembinaan bagi organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

6. Masih Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan tertib hukum di bidang perdagangan termasuk kepastian hukum bagi konsumen.	9. Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar serta penertiban dan evaluasi terhadap alat UTTP
Bidang Energi dan SDM 1. Terbatasnya pasokan listrik untuk industri dan rumah tangga 2. Potensi energi baru terbarukan seperti energi matahari dan mikro hidro serta bio energi belum dimanfaatkan secara optimal.	Bidang Energi dan SDM 1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan guna kebutuhan dasar listrik untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi Masyarakat 2. Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hydro PLTMH dibeberapa Kecamatan 3. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang mengacu pada Program – Program pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023, perlu kembali direview atau ditelaahan seiring dengan telah dilakukannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai dan dilanjutkan dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai, dimana telah dilakukan beberapa Program dan Kegiatan serta indicator-indikator kinerjanya baik ditingkat keluaran (Output), Hasil S(outcome) maupun indicator sasaran strategis SKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk SKPD yang bersangkutan sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2023.

Adapun hasil telaahan/review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini:

TABEL II.7
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN SINJAI

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Rencana Awal RKPD Tahun 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
2	01	03			URUSAN PILIHAN ENERGI & SDM					URUSAN PILIHAN ENERGI & SDM						
2	01	03	15		PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat		100%	1,017,226,878	15	PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat		100%	125,166,000	
				002	Penyusunan Detaill Engineering Design (DED) PLTS Terpusat	Tersedianya data perencanaan teknis pembangunan PLTS terpusat secara detail dan menyeluruh	Kab.Sinjai	1 Dokumen	85,000,000	003	Verifikasi Calon Penerima Manfaat bantuan Reaktor Biogas	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif	Kab.Sinjai	1 Dokumen	38,761,200	
				003	Verifikasi Calon Penerima Manfaat bantuan Reaktor Biogas	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif	Kab.Sinjai	1 Dokumen	44,000,000	004	Pengelolaan Data Alokasi reaktor biogas berbasis SIG	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif berbasis SIG	Kab.Sinjai	10 Desa	25,393,000	
				004	Pengelolaan Data Alokasi reaktor biogas berbasis SIG	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif berbasis SIG	Kab.Sinjai	10 Desa	38,500,000	011	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Reaktor Biogas	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	Kab. Sinjai	75 Orang	34,667,000	
				005	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	Tercapainya peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	kab.sinjai	10 unit	173,226,878	013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan EBT dan Panas Bumi	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan EBT dan panas bumi	Kab.Sinjai	1 Dokumen	26,344,800	
				006	Pengembangan Sumber Daya Manusia Operator PLTS dan PLTMH	Meningkatnya SDM masyarakat pengelola EBTE	Kab.Sinjai	5 Orang	71,500,000							
				007	Pembangunan Rektor Biogas	Tercapainya peningkatan pemanfaatan kotoran ternak menjadi EBTE	Kab. Sinjai	20 Unit	346,500,000							

					008	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pemanfaatan PLTMH	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	Kab. Sinjai	8 Kali	49,500,000							
					009	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pemanfaatan PLTS dan PJUTS	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	Kab. Sinjai	8 Kali	55,000,000							
					010	Pengawasan dan pemantauan Langsung Panas Bumi	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	Kab. Sinjai	4 Kali	27,500,000							
					011	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Reaktor Biogas	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	Kab. Sinjai	10 Kali	82,500,000							
					012	Sosialisasi Pengendalian Dan Pemanfaatan (konservasi) Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	Kab. Sinjai	1 Kali	44,000,000							
						URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN											
2	0	1	0	6	1	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Makan dan Minum Tradisional/Jajanan Sekolah dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen		100%	661,641,330	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Makan dan Minum Tradisional/Jajanan Sekolah dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen		100%	193,761,800	
							Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP		100%				Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP		100%		
					001	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrolagian Daerah	Tersedianya data potensi UTTP di Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	6000 Unit	115,000,000	001	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrolagian Daerah	Terlaksananya Penilaian Unit Metrologi Legal Kab. Sinjai, Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan Kalibrasi Alat Standar Kemetrolagian	Kab. Sinjai	1800 unit	107,288,500	
					002	Pengawasan dan Evaluasi Alat UTTP dan BDKT (Metrologi Legal)	Jumlah alat UTTP yang memenuhi standar	Kab. Sinjai	2224 UTTP	75,690,113	002	Pengawasan dan Evaluasi Alat UTTP dan BDKT (Metrologi Legal)	Jumlah alat UTTP yang sah sesuai standar pengujian	Kab. Sinjai	2000 UTTP	17,160,000	

				003	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan tentang retribusi pelayanan tera ulang	Kab. Sinjai	75 Peserta	135,000,000	004	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Reparatur Bidang Kemetrolagian	Jumlah Tenaga Reparatur UTTP Bidang Kemetrolagian	Kab. Sinjai	10 Orang	46,928,400	
				004	Pelatihan Reparatur Alat UTTP Bidang Kemetrolagian	Meningkatnya tenaga reparatur di bidang kemetrolagian	Kab. Sinjai	10 Orang reparatur	44,725,917	005	Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan	Kab. Sinjai	48 Kali	22,384,900	
				005	Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan	Kab. Sinjai	48 Kali	21,387,300							
				006	Edukasi dan Pemberdayaan Pelaku Usaha IK/IRT dan Konsumen	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha makan dan minuman tradisional/jajanan sekolah da Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Kab. Sinjai	27 sekolah	91,718,000							
				007	Sosialisasi Peraturan Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perlindungan konsumen	Kab. Sinjai	450 Orang	130,000,000							
				014	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga dan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Kab. Sinjai	5 Kecamatan	48,120,000							
2	01	06	20		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Nilai Perdagangan		1453297000 Rupiah	9,904,781,850	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Nilai Perdagangan		1453297000 Rupiah	2,394,647,900		
						Cakupan Bina Kelompok/ Pedagang Usaha Informal		100 KLP			Cakupan Bina Kelompok/ Pedagang Usaha Informal		100 KLP			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang direvitalisasi		15 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang direvitalisasi		15 Unit			
				001	Pengawasan Usaha Perdagangan	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perdagangan	Kab. Sinjai	12 Bulan	30,956,475	001	Pengawasan Usaha Perdagangan	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perdagangan	Kab. Sinjai	12 Bulan	17,132,500	
				002	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima	Tertibnya pedagang kaki lima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	Kab. Sinjai	17 PKL	10,000,000	004	Pasar PKL dan Kuliner Terintegrasi dan Penataan Pedagang Kaki	Terlaksananya Pasar PKL terintegrasi dan pengawasan PKL	Kab.Sinjai	75 PKL	20,974,500	

											Lima					
				005	Operasional UPTD pasar	Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	619,308,800	005	Operasional UPTD pasar	Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	1273 Rupiah	409,859,500	
				006	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi dan pemasaran langsung poduk IK/IRT potensial Kabupaten Sinjai	Luar Daerah dan Dalam Daerah	5 kali	220,022,550	006	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi dan pemasaran langsung poduk IK/IRT potensial Kabupaten Sinjai	Kab Sinjai	3 Kali	42,554,900	
				007	Pendataan Pedagang Kaki Lima	Tersediannya Dokumen Data Pedagang di Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	1 Dokumen	50,000,000	009	Pemantauan dan Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Kab. Sinjai	12 Bulan	66,494,500	
				008	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelacaran distribusi pangan	Kab. Sinjai	3 unit	3,000,000,000	010	Penataan Pedagang Pasar Rakyat	Terlaksananya Penataan Pasar Rakyat	Kab. Sinjai	26 Pasar	99,029,000	
				009	Pemantauan dan Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Kab. Sinjai	12 Bulan	70,521,000	011	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Tersedianya pasar rakyat yang layak dan representatif	Kab. Sinjai	1 Pasar	1,700,637,000	
				010	Penataan Pedagang Pasar Rakyat	Terlaksananya Penataan Pasar Rakyat	Kab. Sinjai	10 Pasar	90,475,125	012	Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Kab. Sinjai	26 Pasar	37,966,000	
				011	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Tersedianya pasar rakyat yang layak dan representatif	Kab. Sinjai	3 Pasar	5,273,673,900							
				012	Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Kab. Sinjai	12 Pasar	152,174,000							
				013	Peningkatan sistem informasi dan tata niaga perdagangan dalam negeri	Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasaran	Kab. Sinjai	56 Kali	62,650,000							
				014	Festival Kuliner Tradisional	Terlaksananya promosi dan pemasaran langsung produksi IK/IRT potensial Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	1 Kali pelaksanaan	325,000,000							
					URUSAN PILIHAN					URUSAN PILIHAN						
2	01	03	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100%	2,333,745,167	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100%	1,222,215,700		

				002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu pelayanan komunikasi, air bersih dan listrik	Kab. Sinjai	12 Bln	108,720,000	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pelayanan komunikasi, air bersih dan listrik	Kab. Sinjai	12 Bulan	43,920,000	
				006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarka - Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Kab. Sinjai	38 Unit	10,450,000	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarka - Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Kab. Sinjai	39 Unit	11,650,000	
				008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kab. Sinjai	12 Bln	14,990,000	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kab. Sinjai	12 Bulan	21,782,000	
				012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	Kab. Sinjai	12 Jenis	4,448,631	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	Kab. Sinjai	12 Jenis	3,131,665	
				015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	Kab. Sinjai	11 Jenis	13,200,000	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	Kab. Sinjai	10 Jenis	12,000,000	
				019	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai	1 Paket ATK, makanan dan minuman	120,074,360	019	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai	1 Paket ATK, makanan dan minuman	110,851,700	
				020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan	Kab. Sinjai	12 Bulan	125,733,784	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	- Jumlah jasa pengelola keuangan, - Jumlah Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semesteran yang tersusun, - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Kab. Sinjai	12 Bulan	101,878,300	
				022	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kab. Sinjai	150 kali	926,064,692	022	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kab. Sinjai	500 kali	640,021,035	
				023	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	Kab. Sinjai	37 Orang	31,883,700	023	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	Kab. Sinjai	38 Orang	28,156,000	
				044	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai	5 Unit	500,000,000	048	Pengadaan Peralatan Gedung	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kab. Sinjai	1 Unit	7,000,000	

											Kantor					
				046	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penyediaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kab. Sinjai	2 Unit	51,420,000	059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	2 Unit	11,045,000	
				048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kab. Sinjai	7 Unit	26,920,000	061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Sinjai	32 Unit	115,260,000	
				059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	1 Unit	38,980,000	063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	14 Unit	9,770,000	
				061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Sinjai	38 Unit	143,940,000	065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	37 Unit	16,500,000	
				063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	14 Unit	7,420,000	096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	Kab. Sinjai	7 Orang	89,250,000	
				065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	36 Unit	17,500,000							
				094	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Sinjai	8 Orang	90,000,000							
				096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	Kab. Sinjai	20 Orang	102,000,000							
2	0	0	0	02	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100%	50,040,400	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100%	47,540,800		
				001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Kab. Sinjai	3 Dokumen	7,564,000	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Kab. Sinjai	3 Dokumen	9,517,600	
				002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Kab. Sinjai	12 Dokumen	42,476,400	002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Kab. Sinjai	12 Dokumen	38,023,200	

					URUSAN PILIHAN					URUSAN PILIHAN					
					PERINDUSTRIAN					PERINDUSTRIAN					
2	0	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Nilai Produksi dari Sektor Industri Daerah		558293000 Rupiah	674,715,482	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Nilai Produksi dari Sektor Industri Daerah		558293000 Rupiah	687,558,800	
	1	7	4			Cakupan Bina Kelompok Binaan Pengrajin		10 Kelompok			Cakupan Bina Kelompok Binaan Pengrajin		10 Kelompok		
						Jumlah Pertumbuhan Industri		4077 IKM			Jumlah Pertumbuhan Industri		4077 IKM		
				001	Pengembangan IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Peningkatan jumlah IKM/IK-IRT makan dan minum yang didampingi dilatih	Kab. Sinjai	100 IK/IRT	164,667,800	003	Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah IKM hasil perikanan yang difasilitasi	Kab. Sinjai	10 IKM	271,839,300
				002	Peningkatan Desain Kemasan Produk IK/IRT	Peningkatan desain label dan produk yang berdaya	Kab. Sinjai	5 IKM	110,000,000	004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan	Peningkatan variasi produk IKM/IK-IRT yang berdaya saing	Kab. Sinjai	20 IK/IRT	57,929,200
				003	Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah IKM hasil perikanan yang difasilitasi	Kab. Sinjai	10 IKM	439,231,320	006	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia dan Aneka	Jumlah IKM kimia dan aneka yang mengikuti pengembangan industri	Kab. Sinjai	5 IK/IRT	41,095,300
				004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan	Peningkatan variasi produk IKM/IK-IRT yang berdaya saing	Kab. Sinjai	15 IK/IRT	29,641,128	007	Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik	Terlaksananya pendampingan dan perbaikan proses produksi IKM mesin serta tersedianya mesin produksi skala IK/IRT	Kab. Sinjai	2 Prototype	89,351,500
				005	Pengembangan IKM Hasil Logam dan Alsintan	Terlaksananya pelatihan diversifikasi aneka produk pandai besi dan perbaikan proses produksi IKM pandai besi serta pembinaan dan pendampingan IKM logam	Kab. Sinjai	10 Jenis produk logam	61,393,046	008	Pemetaan Industri Kecil dan Menengah IK-IRT Berbasis SIG	Tersedia data alokasi IKM/IK-IRT binaan yang dikembangkan dan mandiri berbasis SIG	Kab. Sinjai	9 Kecamatan	138,161,100
				006	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia dan Aneka	Jumlah IKM kimia dan aneka yang mengikuti pengembangan industri	Kab. Sinjai	10 IK/IRT	56,741,146	009	Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan	Terwujudnya Produk IKM yang tersertifikasi Halal dan HAKI	Kab. Sinjai	7 IKM	18,252,600
				007	Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik	Terlaksananya pendampingan dan perbaikan proses produksi IKM mesin serta tersedianya mesin produksi skala IK/IRT	Kab. Sinjai	3 Prototype	110,992,860	013	Revisi Perda Penggunaan Kekayaan Daerah	Tersedianya Perda Tentang penggunaan Kekayaan Daerah terkait Sentra Industri	Kab. Sinjai	3 Perda	70,929,800

				008	Pemetaan Industri Kecil dan Menengah IK-IRT Berbasis SIG	Tersedia data alokasi IKM/IK-IRT binaan yang dikembangkan dan mandiri berbasis SIG	Kab. Sinjai	2 Kecamatan	100,000,000						
				009	Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan	Terwujudnya Produk IKM yang tersertifikasi Halal dan HAKI	Kab. Sinjai	7 IKM	34,618,364						
				010	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Kerajinan	Jumlah IKM kerajinan yang dibina pendampingan dan OJT industri kerajinan	Kab. Sinjai	10 IKM	61,328,938						
				011	Pengembangan IKM Berbasis Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan	Peningkatan kualitas Produk IKM/IK-IRT binaan	Kab. Sinjai	10 IKM	150,000,000						
				013	Revisi Perda Penggunaan Kekayaan Daerah	Tersedianya Perda Tentang penggunaan Kekayaan Daerah terkait Sentra Industri	Kab. Sinjai	1 Perda	70,000,000						
2	01	07	25		PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI	Jumlah Sentra-sentra/IKM Industri Baru		10 Kelompok	150,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI	Jumlah Sentra-sentra/IKM Industri Baru		10 Kelompok	100,000,000	
				004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaan Tembakau	Jumlah IKM industri pengolahan tembakau yang dilatih dan dibina melalui pendampingan dan pelatihan penerapan GMP industri hasil tembakau	Kab. Sinjai	3 Kelompok	150,000,000	004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaan Tembakau	Jumlah IKM industri pengolahan tembakau yang dilatih dan dibina melalui pendampingan dan pelatihan penerapan GMP industri hasil tembakau	Kab. Sinjai	3 Kelompok	100,000,000
JUMLAH TOTAL									14,792,151,107					4,770,891,000	

Berdasarkan hasil review atau telaahan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut yakni, bahwa :

- a) Didalam RKPD awal tahun 2020 terdapat 7 (Tujuh) Program dan 64 (Enam Puluh Empat) kegiatan, maka setelah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan kebutuhan, proyeksi kemampuan sumber anggaran dan hasil musrembang serta penyesuaian program dan nama kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023, maka dapat dilihat bahwa revisi rencana kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral untuk tahun 2020 diputuskan tetap menjadi 7 (Tujuh) Program dan 41 (Empat Puluh Satu) Kegiatan pada Renja 2020.
- b) Hasil revisi tersebut mengurangi beberapa kegiatan yang sangat diperlukan untuk menunjang pencapaian target Program dan Sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Untuk lengkapnya Hasil rumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Tahun 2020 berdasarkan kebutuhan dapat dilihat pada Tabel II.8 berikut.
- c) Dari hasil telaahan/review tersebut dapat dilihat bahwa dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai awalnya direncanakan Program dan Kegiatan yang berdasarkan Renstra SKPD yang diharapkan sebagian besar bersumber dari dana APBD TK II, APBN dan DBHCT baik itu dana DAK maupun dana Tugas Pembantuan Kementerian, dan setelah direvisi maka program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 disesuaikan dengan Prioritas dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah, sehingga Pagu yang dianggarkan menjadi sebesar Rp. 4.770.891.000,-

TABEL II.8
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN SINJAI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		
2	01	03		URUSAN PILIHAN ENERGI & SDM						
2	01	03	15	15	PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat		100%	125,166,000	
				003	Verifikasi Calon Penerima Manfaat bantuan Reaktor Biogas	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif	Kab.Sinjai	1 Dokumen	38,761,200	
				004	Pengelolaan Data Alokasi reaktor biogas berbasis SIG	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif berbasis SIG	Kab.Sinjai	10 Desa	25,393,000	
				011	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Reaktor Biogas	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	Kab. Sinjai	75 Orang	34,667,000	
				013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan EBT dan Panas Bumi	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan EBT dan panas bumi	Kab.Sinjai	1 Dokumen	26,344,800	
2	01	06	19	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Makan dan Minum Tradisional/Jajanan Sekolah dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen		100%	193,761,800	
						Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP		100%		
				001	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrologian Daerah	Terlaksananya Penilaian Unit Metrologi Legal Kab. Sinjai, Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan Kalibrasi Alat Standar Kemetrologian	Kab. Sinjai	1800 unit	107,288,500	
				002	Pengawasan dan Evaluasi Alat UTTP dan BDKT (Metrologi Legal)	Jumlah alat UTTP yang sah sesuai standar pengujian	Kab. Sinjai	2000 UTTP	17,160,000	
				004	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Reparatur Bidang Kemetrologian	Jumlah Tenaga Reparatur UTTP Bidang Kemetrologian	Kab. Sinjai	10 Orang	46,928,400	
				005	Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan	Kab. Sinjai	48 Kali	22,384,900	
2	01	06	20	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Meningkatnya Nilai Perdagangan		1453297000 Rupiah	2,394,647,900	
						Cakupan Bina Kelompok/ Pedagang Usaha Informal		100 KLP		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang direvitalisasi		15 Unit		
				001	Pengawasan Usaha Perdagangan	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perdagangan	Kab. Sinjai	12 Bulan	17,132,500	
				004	Pasar PKL dan Kuliner Terintegrasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya Pasar PKL terintegrasi dan pengawasan PKL	Kab.Sinjai	75 PKL	20,974,500	
				005	Operasional UPTD	Terlaksananva pelayanan	Kab. Sinjai	1273	409,859,500	

					pasar	dan pengelolaan pasar di Kabupaten Sinjai		Rupiah		
				006	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi dan pemasaran langsung poduk IK/IRT potensial Kabupaten Sinjai	Kab Sinjai	3 Kali	42,554,900	
				009	Pemantauan dan Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Kab. Sinjai	12 Bulan	66,494,500	
				010	Penataan Pedagang Pasar Rakyat	Terlaksananya Penataan Pasar Rakyat	Kab. Sinjai	26 Pasar	99,029,000	
				011	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Tersedianya pasar rakyat yang layak dan representative	Kab. Sinjai	1 Pasar	1,700,637,000	DAK
				012	Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Kab. Sinjai	26 Pasar	37,966,000	
				URUSAN PILIHAN						
2	0	0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100%	1,222,215,700	
				002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pelayanan komunikasi, air bersih dan listrik	Kab. Sinjai	12 Bulan	43,920,000	
				006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarka - Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Kab. Sinjai	39 Unit	11,650,000	
				008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kab. Sinjai	12 Bulan	21,782,000	
				012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	Kab. Sinjai	12 Jenis	3,131,665	
				015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	Kab. Sinjai	10 Jenis	12,000,000	
				019	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai	1 Paket ATK, makanan dan minuman	110,851,700	
				020	Pengelolaan Keuangan SKPD	- Jumlah jasa pengelola keuangan, - Jumlah Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semesteran yang tersusun, - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Kab. Sinjai	12 Bulan	101,878,300	
				022	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kab. Sinjai	500 kali	640,021,035	
				023	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	Kab. Sinjai	38 Orang	28,156,000	
				048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kab. Sinjai	1 Unit	7,000,000	
				059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	2 Unit	11,045,000	
				061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Sinjai	32 Unit	115,260,000	
				063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	14 Unit	9,770,000	
				065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	37 Unit	16,500,000	
				096	Bimbingan Teknis	Jumlah aparat yang	Kab. Sinjai	7 Orang	89,250,000	

					Implementasi Peraturan Perundang-undangan	mengikuti bimtek					
2	0131				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100%	47,540,800		
					001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Kab. Sinjai	3 Dokumen	9,517,600		
					002 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Kab. Sinjai	12 Dokumen	38,023,200		
					URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN						
2	0174				PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Nilai Produksi dari Sektor Industri Daerah		558293000 Rupiah	687,558,800		
						Cakupan Bina Kelompok Binaan Pengrajin		10 Kelompok			
						Jumlah Pertumbuhan Industri		4077 IKM			
					003 Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah IKM hasil perikanan yang difasilitasi	Kab. Sinjai	10 IKM	271,839,300		
					004 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan	Peningkatan variasi produk IKM/IK-IRT yang berdaya saing	Kab. Sinjai	20 IK/IRT	57,929,200		
					006 Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia dan Aneka	Jumlah IKM kimia dan aneka yang mengikuti pengembangan industry	Kab. Sinjai	5 IK/IRT	41,095,300		
					007 Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik	Terlaksananya pendampingan dan perbaikan proses produksi IKM mesin serta tersedianya mesin produksi skala IK/IRT	Kab. Sinjai	2 Prototype	89,351,500		
					008 Pemetaan Industri Kecil dan Menengah IK-IRT Berbasis SIG	Tersedia data alokasi IKM/IK-IRT binaan yang dikembangkan dan mandiri berbasis SIG	Kab. Sinjai	9 Kecamatan	138,161,100		
					009 Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan	Terwujudnya Produk IKM yang tersertifikasi Halal dan HAKI	Kab. Sinjai	7 IKM	18,252,600		
					013 Revisi Perda Penggunaan Kekayaan Daerah	Tersedianya Perda Tentang penggunaan Kekayaan Daerah terkait Sentra Industri	Kab. Sinjai	3 Perda	70,929,800		
2	0175				PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI	Jumlah Sentra-sentra/IKM Industri Baru		10 Kelompok	100,000,000		
					004 Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaan Tembakau	Jumlah IKM industri pengolahan tembakau yang dilatih dan dibina melalui pendampingan dan pelatihan penerapan GMP industri hasil tembakau	Kab. Sinjai	3 Kelompok	100,000,000	DBHCT	
JUMLAH TOTAL									4,770,891,000		

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah perlu menerapkan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Pendekatan partisipatif, top down dan bottom up tersebut dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dengan menyelaraskan perencanaan melalui Musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini, telah melalui proses perencanaan seperti yang diamanatkan oleh perundang-undangan dan telah mengakomodir hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Walau demikian tentu hasil-hasil musrembang tersebut tidak semuanya dapat diakomodir, oleh karena pertimbangan keterbatasan anggaran atau berdasarkan skala prioritas Pembangunan Daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan usulan dari hasil-hasil musrembang baik itu bersumber dari kelompok Masyarakat, LSM serta pemangku kepentingan lainnya seperti pokok-pokok pikiran Anggota DPRD TK II Kabupaten Sinjai, telah kami kaji dan sesuaikan dengan Nomenklatur program dan kegiatan yang ada di Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 serta dikaitkan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM pada tahun 2019, selengkapnya dapat kami sajikan pada Tabel II.7 sebagai berikut :

TABEL II.9
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN SINJAI

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
15	PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI					
	005	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) (Pengadaan dan Pemasangan PJUTS)	Tersebar di 8 Kecamatan	Tercapainya peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	10 unit penerangan jalan umum tenaga surya	
	013	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pemanfaatan EBT dan Panas Bumi (4 PLTMH dan 4 PLTS serta 4 lokasi panas bumi)	Kab. Sinjai	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan EBT dan Panas Bumo	4 PLTMH dan 4 PLTS serta 4 lokasi panas bumi	
	014	Peningkatan Efektivitas PLTMH Swadaya (Pengadaan dan perangkaian electronic load controller dan ballast load pada PLTMH swadaya masyarakat)	Sinjai Barat/Desa Terasa	Optimalisasi fungsi PLTMH swadaya masyarakat	1 PLTMH Swadaya	
	015	Verifikasi Calon Penerimaan Bantuan Reaktor Biogas dan Pengelolaan Data Penerima Bantuan Reaktor Biogas Berbasis SIG (Dokumen hasil verifikasi dan data alokasi penerima biogas berbasis SIG)	Kab. Sinjai	Dokumen hasil verifikasi calon penerima reaktor biogas dan data alokasi penerima biogas yang terkelola berbasis SIG	1 Dokumen verifikasi calon penerima	
	002	Penyusunan Detaill Engineering Design (DED) PLTS Terpusat (Penyusunan Dokumen DED)	Kab. Sinjai	Tersedianya data perencanaan teknis pembangunan PLTS terpusat secara detail dan menyeluruh	1 Dokumen DED	
19	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN					
	002	Pengawasan dan Evaluasi Alat UTTP dan BDKT (Metrologi Legal) (Pelaksanaan Tera Ulang)	Kab. Sinjai	Jumlah alat UTTP yang memenuhi standar	2224 UTTP	
	004	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Reparatur Bidang Kemetrolgian (Pelatihan Petugas Reparatur)	Kab. Sinjai	Jumlah Tenaga Reparatur UTTP Bidang Kemetrolgian	10 Orang	
	005	Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang (Pengawasan Terhadap Produk Makanan di Pasaran)	Kab. Sinjai	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan	48 kali pelaksanaan pengawasan	

20	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI					
	010	Penataan Pedagang Pasar Rakyat (Penataan Pedagang Pasar Di Kecamatan)	Kab. Sinjai	Terlaksananya Penataan Pasar Rakyat	26 Pasar	
	011	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (Pembangunan/Revitalisasi Pasar)	Desa Pude dan Aska	Tersedianya pasar rakyat yang layak dan representative	2 unit Pasar	
	012	Pemutakhiran Data Pedagang Pasar (Perbaikan Data Pedagang yang Melaksanakan Kegiatan Perdagangan di Setiap Pasar)	Kab. Sinjai	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	26 Pasar	
24	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH					
	003	Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan (Pendampingan operasional Lab. Dari BBIHP) (Pendampingan Pemenuhan persyaratan edar dari BPOM) (Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan)	Kab. Sinjai	Jumlah IKM hasil perikanan yang difasilitasi	10 IKM	
	004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan (Pelatihan Pengolahan Gula Aren dan Diversifikasi) (Pelatihan Olahan Kolang Kaling)	Kab. Sinjai	Peningkatan variasi produk IKM/IK-IRT yang berdaya saing	10 IK/IRT	
	006	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia dan Aneka (Pelatihan Pengembangan Industri Fashion)	Kab. Sinjai	Jumlah IKM kimia dan aneka yang mengikuti pengembangan industri	5 IK/IRT	
	007	Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik (Pembuatan 2 Mesin Prototype) (Pelatihan Berbasis Elektronika Service Handphone)	Kab. Sinjai	Terlaksananya pendampingan dan perbaikan proses produksi IKM mesin serta tersedianya mesin produksi skala IK/IRT	2 Prototype	
	009	Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan (Memfasilitasi Pengujian Sertifikasi Halal Produk dan Sertifikasi Pendaftaran HAKI)	Kab. Sinjai	Terwujudnya Produk IKM yang tersertifikasi Halal dan HAKI	3 IKM (2 Produk Halal dan 1 Jenis HAKI)	
25	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI					
	004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaan Tembakau	Kab. Sinjai	Jumlah IKM industri pengolahan tembakau yang dilatih dan dibina melalui pendampingan dan pelatihan penerapan GMP industri hasil tembakau	3 Kelompok	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbeda dengan RKP sebelumnya, penyusunan RKP 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP 2019 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2019, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2019 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 tersebut, maka sasaran pembangunan Tahun 2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
3. Angka Kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
4. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019

dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Cita 2

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Cita 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Cita 4

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Cita 5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Cita 6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7. Cita 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Cita 8

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Cita 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pokok pembangunan kabinet kerja; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu; serta (4) *quick wins* dan program lanjutan lainnya. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2019.

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 terdiri dari:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi:

a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas:

- 1) reformasi birokrasi pemerintahan;
- 2) penegakan hukum dan kelembagaan politik;
- 3) kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa;
- 4) peneguhan jati diri dan karakter bangsa; dan
- 5) daya rekat sosial dalam kemajemukan.

- b. Kesehatan, dengan Program Prioritas:
 - 1) penguatan upaya promotif dan preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”;
 - 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 3) perbaikan gizi masyarakat; dan
 - 4) peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
 - c. Pendidikan, dengan Program Prioritas:
 - 1) penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata;
 - 2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
 - 3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;
 - 4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas;
 - 5) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter;
 - 6) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;
 - 7) penguatan kelembagaan perguruan tinggi;
 - 8) peningkatan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi; dan
 - 9) peningkatan relevansi pendidikan.
 - d. Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas:
 - 1) fasilitasi penyediaan hunian layak baru;
 - 2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh);
 - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan
 - 4) peningkatan ketersediaan air baku.
1. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:
- a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas:
 - 1) peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
 - 2) peningkatan produksi padi dan pangan lain;
 - 3) kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; dan
 - 4) penanganan gangguan terhadap produksi pangan.
 - b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas:
 - 1) konektivitas (tol) laut dan industri maritim;
 - 2) industri perikanan dan hasil laut;
 - 3) tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari;
 - 4) kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - 5) penanggulangan dan penyelesaian IUU *Fishing* dan Keamanan Laut;
 - 6) Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas:
 - 1) peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;

- 2) peningkatan aksesibilitas energi;
- 3) pengembangan cadangan energi;
- 4) penyediaan energi primer;
- 5) efisiensi dan konservasi energi; dan
- 6) pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.

d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas:

- 1) promosi wisata indonesia;
- 2) pengembangan 10 destinasi wisata;
- 3) SDM dan kelembagaan pariwisata;
- 4) layanan kemudahan wisman masuk;
- 5) penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; dan
- 6) jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.

e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), dengan Program Prioritas:

- 1) pengembangan kawasan industri/KEK;
- 2) penumbuhan populasi industri;
- 3) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;
- 4) SDM industri yang Kompeten dan Disiplin;
- 5) produktivitas dan daya saing industri;
- 6) ketersediaan infrastruktur dan energi;
- 7) ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;
- 8) hubungan industrial yang harmonis;
- 9) pemberian insentif fiskal yang harmonis; dan
- 10) pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif.

2. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:

a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas:

- 1) penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;
- 2) perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;
- 3) pengembangan kewirausahaan;
- 4) perkuatan basis perekonomian perdesaan;
- 5) perluasan pelayanan dasar; dan
- 6) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.

b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas:

- 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;
- 2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria;
- 3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria;
- 4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA; dan
- 5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas:

- 1) pembangunan PLBN Terpadu;
 - 2) pembangunan 10 PKSN Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;
 - 3) membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku;
 - 4) pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara; dan
 - 5) peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi.
- d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas:
- 1) prioritas pengembangan ekonomi lokal;
 - 2) peningkatan aksesibilitas;
 - 3) pemenuhan pelayanan dasar publik; dan
 - 4) peningkatan SDM dan IPTEK.
- e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas:
- 1) pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi;
 - 2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
 - 3) pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;
 - 4) penguatan pemerintahan desa;
 - 5) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
 - 6) pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa – kota; dan
 - 7) pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
- f. Perkotaan, dengan Program Prioritas:
- 1) mewujudkan sistem perkotaan;
 - 2) pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp);
 - 3) mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
 - 4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK; dan
 - 5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.
- g. Konektivitas, dengan Program Prioritas:
- 1) pembangunan dan pengembangan transportasi laut;
 - 2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;
 - 3) pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan;
 - 4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran;
 - 5) pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian;
 - 6) pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (*Inland Waterway*);

- 7) pembangunan dan pengembangan transportasi umum masal perkotaan; dan
 - 8) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi.
3. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, meliputi:
- a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, terdiri dari:
 - 1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas:
 - a) otonomi daerah;
 - b) perizinan dan investasi; dan
 - c) penataan ruang.
 - 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas:
 - a) penegakan hukum yang berkualitas;
 - b) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
 - c) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
 - b. Stabilitas keamanan dan ketertiban, dengan program prioritas:
 - 1) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;
 - 2) keselamatan dan keamanan laut yang terkendali;
 - 3) lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba;
 - 4) pelayanan prima kepolisian;
 - 5) postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman; dan
 - 6) keamanan data dan informasi (keamanan *cyber*).
 - c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dengan program prioritas:
 - 1) penguatan lembaga demokrasi;
 - 2) peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
 - 3) pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik;
 - 4) pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme;
 - 5) pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan;
 - 6) perlindungan WNI/BHI di luar negeri;
 - 7) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan;
 - 8) pemantapan peran di ASEAN; dan
 - 9) penguatan diplomasi *Soft Power*.
 - d. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas:
 - 1) pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 - 2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan; dan
 - 3) peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.
4. Pembangunan Ekonomi, meliputi:
- a. Perbaiki iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas:
 - 1) peningkatan kemudahan berusaha;
 - 2) pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah;
 - 3) pengembangan layanan perizinan terpadu;

- 4) peningkatan persaingan usaha yang sehat;
 - 5) percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;
 - 6) pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis;
 - 7) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
- b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari:
- 1) Sisi produksi, dengan program prioritas:
 - a) Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor;
 - b) Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor;
 - c) Peningkatan Ekspor Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d) Pengembangan Industri Pengolah Sumber Daya Alam Berorientasi Ekspor;
 - 2) Sisi permintaan, dengan program prioritas:
 - a) Pengembangan Fasilitas Ekspor;
 - b) Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perdagangan Internasional (*Market Access*);
 - c) Penguatan *Market Intelligence*, Promosi, dan Asistensi Ekspor.
- c. Reformasi Fiskal, terdiri dari:
- 1) Pengoptimalan Pendapatan Negara, dengan Program Prioritas:
 - a) Pengoptimalan Perpajakan;
 - b) Dukungan Regulasi;
 - c) Pengoptimalan PNBP; dan
 - d) Penguatan Institusi.
 - 2) Peningkatan Kualitas Belanja Negara, dengan Program Prioritas:
 - a) perbaikan pelaksanaan anggaran;
 - b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif;
 - c) peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa; dan
 - d) belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2019 mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 untuk program dan kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Kabupaten Sinjai.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah :

- 1) Meningkatkan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten
- 2) Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten dan Meningkatkan Keamanan Produk Barang dan Jasa yang Beredar
- 3) Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan EBTKE dan Panas Bumi

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi serta daya saing industri daerah.
2. Meningkatnya pertumbuhan industri baru yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam local.
3. Meningkatnya nilai tambah dari sektor perdagangan di daerah.
4. Terciptanya keamanan produk barang beredar dan jasa serta kepastian hukum bagi konsumen dan pengusaha.
5. Meningkatnya pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan EBTKE dan panas bumi.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pilihan pembangunan daerah yakni di sector perdagangan, Perindustrian dan ESDM serta pelaksanaan tugas Bupati Sinjai dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan dituntut untuk menghasilkan kinerja nyata yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah selama 5 Tahun pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023, pada dasarnya program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah yang pada dasarnya muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 yaitu :

***”TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN,
DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”***

serta sesuai dengan Visi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 yaitu :

***“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN PENGELOLAAN POTENSI ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL YANG TANGGUH , KREATIF INOVATIF DAN PROFESIONAL”***

Maka program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2020 terdiri dari :

1. PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dibidang energy dan sumber daya mineral dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan yaitu :

- a. Verifikasi Calon Penerima Manfaat Bantuan Reaktor Biogas
- b. Pengelolaan Data Alokasi Reaktor Biogas Berbasis SIG
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Reaktor Biogas
- d. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan EBT dab Panas Bumi

2. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Program ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dalam berniaga dan adanya kepastian hukum bagi konsumen dengan melaksanakan berbagai kegiatan – kegiatan diantara lain ;

- a. *Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrollogian Daerah.*
- b. *Pengawasan dan Evaluasi Alat UTP dan BDKT (Metrologi Legal).*
- c. *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Reparatur Bidang Kemetrollogian.*
- d. *Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang.*

3. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disektor perdagangan dengan melaksanakan berbagai kegiatan – kegiatan diantara lain ;

- a. *Pengawasan Usaha Perdagangan.*
- b. *Pasar PKL dan Kuliner Terintegrasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima.*
- c. *Operasional UPTD Pasar.*
- d. *Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.*
- e. *Pemantauan dan Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya.*
- f. *Penataan Pedagang Pasar Rakyat.*
- g. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.*
- h. *Pemutakhiran Data Pedagang Pasar;*

4. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Program ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan Industri Kecil dan Menengah yang sudah ada agar nantinya dapat tercipta IKM/IRT yang dapat maju dan mandiri. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. *Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan.*
- b. *Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan.*
- c. *Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia dan Aneka.*
- d. *Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronika.*
- e. *Pemetaan Industri Kecil dan Menengah IK-IRT Berbasis SIG*
- f. *Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan*
- g. *Revisi Perda Penggunaan Kekayaan Daerah.*

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

Program tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sentra – sentra industry baru yang potensial yang pada akhirnya akan memunculkan pelaku-pelaku usaha industry baru yang berbasis pada pemanfaatan Sumber daya alam local/potensi local. Adapun program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yakni;

- a. *Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaam Tembakau*

Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan tupoksinya.

2. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan – pelaporan kantor baik itu laporan capaian kinerja dan keuangan maupun laporan-laporan lainnya.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja para aparatur. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan Pengukuran output maupun outcome program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dan harus menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.